
EFISIENSI BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI WILAYAH TAPAL KUDA PROVINSI JAWA TIMUR

Mega Setyowati^{1*}; Achmad Solihin²

Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia^{1,2}

Email : mega.setyowati-2020@feb.unair.ac.id¹; mgsetyowati@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi belanja pemerintah daerah kabupaten/kota di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa Timur terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tahun periode yaitu 2013-2022. Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan output-oriented dan asumsi Variable Return to Scale (VRS) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi. Input yang digunakan dalam penelitian ini yaitu realisasi anggaran belanja pemerintah daerah fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, sementara output yang digunakan yaitu kesejahteraan masyarakat yang diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian menunjukkan selama tahun 2013-2022 Kota Surabaya dan Kota Pasuruan menjadi wilayah yang konsisten mencapai kondisi efisien. Sementara kabupaten/kota lain hanya mencapai kondisi efisien pada tahun-tahun tertentu. Secara rata-rata, tingkat efisiensi kabupaten yang berada di Wilayah Tapal Kuda sub-bagian Pulau Madura lebih rendah dibandingkan dengan sub-bagian lainnya. 4 (empat) kabupaten di sub-bagian wilayah Pulau Madura berada pada rentang nilai 0,858-0,894. Kabupaten/kota yang berada di Sub-bagian Teluk Madura mencapai rata-rata tertinggi yaitu 0,998-1,000. Sementara itu rata-rata tingkat efisiensi wilayah sub-bagian Selat Madura memiliki rentang nilai sebesar 0,900-1,000.

Kata Kunci : Belanja Pemerintah Daerah; Kesejahteraan Masyarakat; Efisiensi; Data Envelopment Analysis (DEA); Output-Oriented; Variable Return to Scale (VRS)

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency of local government spending in the regencies/cities of the Tapal Kuda Region, East Java Province, on community welfare over the period 2013-2022. The Data Envelopment Analysis (DEA) method, with an output-oriented approach and Variable Return to Scale (VRS) assumption, is used to measure the level of efficiency. The inputs used in this study are the realization of local government budget spending on education, health, and social protection functions, while the output is publik welfare, measured using the Human Development Index (HDI). The results of the study show that during the years 2013-2022, Surabaya City and Pasuruan City consistently achieved efficient conditions, while other districts/cities only achieved efficient conditions in certain years. The efficiency level of districts in the Wilayah Tapal Kuda, specifically the Madura Island sub-section, is lower compared to other sub-sections. Four districts in the Madura Island sub-section have efficiency scores ranging from 0.858 to 0.894. Districts/cities in the Madura Bay sub-section achieve the highest average efficiency scores, ranging from 0.998 to 1.000. Meanwhile, the average efficiency level of the Madura Strait sub-section has a score range of 0.900 to 1.000.

Keywords : Regional Government Spending; Public Welfare; Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Output-Oriented; Variable Return to Scale (VRS)

PENDAHULUAN

Sejak sistem desentralisasi diberlakukan di Indonesia, pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur jalannya pemerintahan secara mandiri. Pemerintah daerah juga menjadi lebih leluasa dan responsif untuk mengalokasikan sumber daya finansial untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan urgensi di daerahnya. Sumber daya finansial yang dimaksud yaitu berupa belanja pemerintah. Belanja atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen paling utama dari kebijakan pemerintah berfungsi mendistribusikan dan pemeratakan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, program-program perlindungan sosial, dan lain sebagainya (Boadway & Dougherty, 2018). Oleh karena itu pemerintah diharuskan memanfaatkan belanja daerah secara efisien sehingga mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat (Brini, 2016).

Hingga saat ini, efisiensi belanja daerah masih menjadi masalah penting dalam pelaksanaan pembangunan. Efisiensi belanja daerah didefinisikan sebagai suatu kegiatan pemerintah dalam mengoptimalkan pengeluarannya untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat. Untuk dikatakan efisien, maka besarnya belanja yang digunakan harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapat mengenai kesejahteraan masyarakat selalu mengalami perkembangan. Kesejahteraan masyarakat pada awalnya diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), dimana semakin tinggi nilai PDB suatu daerah, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat dan negara juga besar. Namun beberapa studi kemudian menemukan bahwa PDB dianggap tidak cukup untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena PDB saat ini lebih digunakan sebagai indikator politik yang kemudian hanya difokuskan pada pengejaran pertumbuhan ekonomi saja (Stiglitz et al, 2011). Gagasan mengenai kesejahteraan masyarakat kemudian berkembang, hingga dinyatakan bahwa kesejahteraan dapat dicapai apabila dengan memastikan pembangunan manusia. Amartya Sen (2005) pertama kali memperkenalkan konsep pembangunan manusia dan mendefinisikannya sebagai suatu usaha membangun sumber daya untuk mencapai kesejahteraan melalui

pengembangan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan kreativitas masyarakat. Pembangunan manusia secara makro dapat diukur menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Timur secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,86 persen dari tahun 2013 hingga 2023. Gambar 1.1 menyajikan informasi terkait capaian IPM kabupaten/kota di Jawa Timur. IPM tertinggi dicapai oleh Kota Surabaya yaitu sebesar 83,45 dan berada di atas capaian provinsi yang sebesar 73,38. Sementara itu, capaian IPM terendah di Jawa Timur diduduki oleh beberapa daerah, yaitu Kabupaten: (a) Sampang; (b) Bangkalan; (c) Probolinggo; (d) Lumajang; (e) Pamekasan; (f) Bondowoso; (g) Sumenep; (h) Jember; dan (i) Situbondo. Beberapa daerah tersebut merupakan daerah yang umumnya disebut dengan Wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur. Wilayah Tapal Kuda sendiri bukan merupakan daerah yang berdiri sebagai unit daerah administrasi, melainkan penyebutan wilayah yang letaknya di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Supriono (1994) menyatakan bahwa penggunaan istilah Wilayah Tapal Kuda ini dimunculkan oleh pihak keamanan pada tahun 1977 ketika menjelang pelaksanaan pemilu. Secara territorial, sebagaimana disajikan dalam Gambar 1.2, Wilayah Tapal Kuda dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sub-wilayah, yaitu: (a) Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep); (b) Teluk Madura (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo); serta (c) Selat Madura (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo).

Capaian IPM beberapa daerah di Wilayah Tapal Kuda yang masih lebih rendah di bandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah bersangkutan masih rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini apabila tidak tertangani maka akan mengakibatkan permasalahan baru seperti kemiskinan. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Sebagai pelaksanaan pembangunan, peran pemerintah dapat terlihat melalui sisi anggaran belanja. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan daerah secara mandiri. Namun demikian, pemerintah dituntut untuk melakukan

efisiensi belanja sehingga apa yang telah dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar mampu mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat efisiensi belanja pemerintah daerah yang berada di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari pembangunan manusia. Belanja pemerintah daerah menurut fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial tahun 2013-2022 digunakan sebagai input, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menjadi tolak ukur capaian kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai output. Ketiga jenis belanja pemerintah tersebut dipilih karena mewakili masing-masing komponen pembentuk IPM yaitu belanja fungsi pendidikan mewakili indeks pendidikan, belanja fungsi kesehatan mewakili indeks kesehatan dan belanja fungsi perlindungan sosial mewakili daya beli masyarakat. Gupta dkk. (1998) menyatakan bahwa belanja pemerintah untuk sektor kesehatan dan pendidikan dapat memberikan pengaruh positif pada kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, melalui belanja perlindungan sosial pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, sehingga mereka tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis non-parametrik yaitu *Data Envelopment Analysis* (DEA) untuk menghitung tingkat efisiensi. Pendekatan yang digunakan yaitu *output oriented* dengan asumsi *Variable return to Scale* (VRS).

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Efisiensi menurut arti ekonomi yaitu mengukur rasio output terhadap input atau jumlah output yang dihasilkan per unit input (Anthony & Young, 1999). Efisiensi berhubungan erat dengan teori produksi dan konsep produktivitas. Efisiensi diartikan sebagai suatu usaha untuk menghasilkan output maksimum dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia, seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Dalam teori produksi dijelaskan bahwa output suatu kegiatan dipengaruhi oleh penggunaan dari beberapa kombinasi input. Penggunaan beberapa kombinasi input yang tepat akan menghasilkan output optimal pada tingkat yang sama. Penggunaan kombinasi input ini dapat dengan mudah dijelaskan dalam peta kurva isokuan (Nicholson & Snyder, 2012).

Konsep perhitungan efisiensi menggunakan kombinasi banyak input diperkenalkan oleh Farrell (1957). Farrell (1957) mengungkapkan bahwa efisiensi dari suatu perusahaan atau unit pembuat keputusan terbagi menjadi 2 komponen, yaitu efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis yaitu efisiensi yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan atau unit pembuat keputusan dalam menghasilkan output optimal dengan penggunaan input tertentu. Sementara efisiensi alokatif menunjukkan pemilihan kombinasi input yang menghasilkan output tertentu dengan biaya minimum (Coelli, Battese, & Rao, 1998). Proses produksi akan disebut efisien secara teknis jika berada di sepanjang garis *Production frontier*. *Production frontier* menunjukkan keterkaitan antara input dan output, dimana *Production frontier* ini mewakili output maksimum yang dapat dicapai oleh setiap kombinasi input yang digunakan.

Teori produksi dan konsep efisiensi di atas kemudian digunakan sebagai landasan dalam mendefinisikan efisiensi belanja pemerintah daerah. Chan dan Karim (2012), mengartikan efisiensi belanja pemerintah sebagai kemampuan pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi (output) dengan tingkat pengeluaran pemerintah (input) tertentu atau kemampuan pemerintah untuk meminimalkan belanja pemerintah (input) untuk mencapai level kesejahteraan tertentu. Efisiensi belanja pemerintah dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan belanja dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur tingkat efisiensi berdasarkan input untuk menghasilkan output tertentu yang dilakukan dengan analisis secara matematis dan menggunakan metode analisis non-parametrik, sehingga tidak memerlukan pengujian hipotesis.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Data yang digunakan dalam studi ini yaitu data sekunder berupa data IPM, belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dari 11 (sebelas) kabupaten/kota di Wilayah Tapal Kuda Provinsi Jawa

Timur yaitu Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Situbondo. Periode penelitian yang dikaji yaitu dari tahun 2013 hingga 2022. Data diperoleh melalui publikasi dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif non-parametrik dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA merupakan teknik matematis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari beberapa kumpulan input atau yang disebut *Decision Making Unit* (DMU) dalam menghasilkan suatu output, dimana hubungan fungsi antara input dan output tidak terlalu dihiraukan (Purwantoro & Siswadi, 2006). Pendekatan yang digunakan yaitu *output-oriented* dengan asumsi *Variable Return to Scale* (VRS) dan *Constan Return to Scale* (CRS). Asumsi VRS menunjukkan suatu kondisi dimana peningkatan input yang terjadi akan meningkatkan output secara tidak proporsional. Artinya ketika input meningkat dua kali maka output akan meningkat sebesar kurang dari atau lebih dari dua kali. Asumsi VRS digunakan dalam penelitian ini karena menunjukkan nilai yang dirasa lebih realistis dan mencerminkan perubahan yang dapat di dunia nyata (Cheng dkk, 2015). Model dengan pendekatan *output-oriented* dan asumsi VRS dapat dituliskan melalui rumusan matematis berikut:

$$\max e_0 = \mu \cdot IPM \tag{3.1}$$

Subject to:

$$v_1 E_{pend} + v_2 E_{kes} + v_3 E_{sos} = 1 \tag{3.2}$$

$$\mu \cdot HDI_i - (v_1 E_{educ} + v_2 E_{health} + v_3 E_{social}) \leq 0 \tag{3.3}$$

$$\mu, v_1, v_2, v_3 \geq 0 \tag{3.4}$$

Keterangan:

- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- E_{pend} = Belanja pemerintah fungsi pendidikan
- E_{kes} = Belanja pemerintah fungsi kesehatan
- E_{sos} = Belanja pemerintah fungsi perlindungan sosial
- u = Bobot untuk output HDI
- $v_{1,2,3}$ = Bobot untuk input E_{pend} , E_{kes} , dan E_{sos}

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil pengukuran tingkat efisiensi belanja pemerintah dengan menggunakan metode DEA disajikan dalam Tabel 4.1. Suatu *Decision Making Unit* (DMU) dikatakan efisien apabila menunjukkan nilai satu atau 100 persen. Kota Surabaya dan Kota Pasuruan konsisten mencapai kondisi efisien (skor efisiensi=1) selama tahun 2013-2022 dalam alokasi pengeluaran pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sepanjang. Selama tahun 2013 hingga 2022, Kabupaten Sidoarjo hanya dua kali mengalami kondisi tidak efisien, yaitu pada tahun 2014 (skor 0,987) dan tahun 2020 (skor 0,995). Kabupaten yang berada di Wilayah Tapal Kuda sub-bagian Pulau Madura hanya mencapai kondisi efisien pada beberapa tahun tertentu. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa: (1) Kabupaten Sumenep hanya mencapai kondisi efisien pada tahun 2018 dan 2021; (2) Kabupaten Pamekasan efisien pada tahun 2021 saja; (3) Kabupaten Sampang efisien pada tahun 2018, 2020 dan 2021; serta (4) Kabupaten Bangkalan efisien pada tahun 2016, 2017 dan 2022. Sementara itu, Kabupaten yang berada di Wilayah Tapal Kuda sub-bagian Selat Madura selain Kota Pasuruan juga mencapai kondisi efisien pada beberapa tahun tertentu, dengan rincian: (1) Kabupaten Pasuruan hanya efisien pada tahun 2020; (2) Kabupaten Probolinggo efisien pada tahun 2014, 2019 dan 2020; (3) Kota Probolinggo efisien pada tahun 2013, 2015 hingga 2018, dan 2020; serta (4) Kabupaten Situbondo hanya efisien pada tahun 2019 saja. Secara rata-rata, tingkat efisiensi kabupaten yang berada di Wilayah Tapal Kuda sub-bagian Pulau Madura lebih rendah dibandingkan dengan sub-bagian lainnya. Berdasarkan Tabel 4.1, rata-rata tingkat efisiensi empat kabupaten di sub-bagian wilayah tersebut berada pada rentang nilai 0,858-0,894. Kabupaten/kota yang berada di Sub-bagian Teluk Madura mencapai rata-rata tertinggi yaitu 0,998-1,000. Sementara itu rata-rata tingkat efisiensi wilayah sub-bagian Selat Madura memiliki rentang nilai sebesar 0,900-1,000.

Metode DEA juga menghasilkan analisis target perbaikan, dimana hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang belum efisien perlu meningkatkan capaian kesejahteraan masyarakat (output) secara optimal dengan penggunaan belanja pemerintah (input) yang tersedia. Berdasarkan hasil target perbaikan dalam Tabel 4.2, Kabupaten Sumenep menjadi daerah yang memerlukan perbaikan output

selama tahun 2013-2022. Pada tahun 2013 dengan memanfaatkan belanja pemerintah fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang ada, seharusnya Kabupaten Sumenep mampu mencapai output IPM sebesar 73,02. Namun nilai IPM yang berhasil dicapai Kabupaten Sumenep hanya sebesar 60,84. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Sumenep tidak efisien dalam mengoptimalkan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai kondisi efisien, maka IPM (output) membutuhkan perbaikan output sebesar 12,18 poin atau sebesar 16,68 persen dari capaian aktual. Interpretasi yang sama berlaku pada setiap daerah dan tahun sesuai dengan hasil yang disajikan dalam Tabel 4.2.

Pembahasan

Adanya desentralisasi fiskal seharusnya dapat membuat pemerintah masing-masing daerah mampu mewujudkan efisiensi pengeluarannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil empiris di kabupaten/kota yang berada di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur dari tahun 2013-2022, hanya Kota Surabaya dan Kota Pasuruan yang berhasil mencapai kondisi efisien dalam mengalokasikan belanja pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan perlindungan pada masing-masing kabupaten/kota yang berfluktuatif dan cenderung meningkat tiap tahun ternyata belum efisien digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Pasuruan misalnya, dengan belanja pemerintah terbesar ketiga setelah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo dari sebelas kabupaten/kota di Wilayah Tapal Kuda (lihat Gambar 4.1), ternyata belum mampu mencapai kondisi efisien sepanjang tahun 2013-2022. Hal ini bertolak belakang dengan Kota Pasuruan yang memiliki pengeluaran relatif paling rendah namun mampu menggunakan belanja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efisien. Hasil temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan dan tingginya belanja pemerintah untuk sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, tidak menjamin tercapainya peningkatan dalam kesejahteraan masyarakat. Hasil ini selaras dengan studi-studi terdahulu yang hasilnya menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran publik setiap tahunnya, tidak selalu meningkatkan pendidikan, kesehatan dan layanan publik lainnya (Gupta & verhoven, 2001; Jarasuriya & Woodon, 2003; Afonso dkk, 2010; Pertiwi, 2007; Yunan, 2014; Ahmed dkk,

2019). Dengan demikian, asumsi desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa pemerintah masing-masing daerah lebih paham mengenai kondisi dan kebutuhan daerahnya dalam konteks ini tidak sepenuhnya benar.

Penyebab inefisiensi pengeluaran pemerintah salah satunya disebabkan karena sebagian besar belanja pemerintah daerah masih dialokasikan mengal untuk belanja pegawai atau Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga kesejahteraan hanya terfokus pada kesejahteraan ASN dan kesejahteraan masyarakat secara luas menjadi kurang optimal. Sementara belanja untuk modal memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan belanja pegawai. Selain itu untuk pengeluaran sektor pendidikan, menurut Solihin dkk (2017) menyatakan bahwa pemerintah di banyak kabupaten dan kota di Jawa Timur belum mampu mengidentifikasi masalah pengalokasian belanja untuk pendidikan secara tepat. Pemerintah juga dirasa kurang mampu mengidentifikasi permasalahan pelayanan publik di bidang pendidikan, seperti sarana dan prasarana pendidikan, serta administrasi, sehingga perencanaan anggaran belanja pendidikan masih tidak tepat sasaran. Hal ini bisa saja terjadi pula pada pengeluaran atau belanja pemerintah di sektor lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran tingkat efisiensi menggunakan DEA, diperoleh kesimpulan bahwa Kota Surabaya dan Kota Pasuruan menjadi daerah di Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur yang mencapai kondisi efisien secara konsisten dari tahun 2013-2022 dalam memanfaatkan belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Sementara kabupaten/kota lain hanya mencapai kondisi efisien pada tahun-tahun tertentu. Selain itu, peningkatan dan tingginya pengeluaran pemerintah suatu daerah untuk sektor pelayanan publik tidak menjamin tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat, bila proporsi pengeluarannya didominasi oleh belanja pegawai daripada belanja modal.

Rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan kebijakan pemanfaatan belanja pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah lebih mengoptimalkan proporsi belanja modal, mengingat belanja modal merupakan modal pemerintah membangun infrastruktur pelayanan publik yang lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Pemanfaatan pengeluaran pemerintah juga diharapkan untuk mewujudkan program-

program inovatif dalam meningkatkan pembangunan manusia, dimana program-program tersebut juga diharapkan menarik minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses peningkatan kesejahteraan. Terakhir saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan penggunaan pendekatan *input-oriented* dalam analisis. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian dan mengaikaatkannya dengan indikator-indikator ekonomi lain, serta menganalisis mengenai faktor yang menjadi penyebab inefisiensi dalam sektor pemerintahan secara lebih jauh.

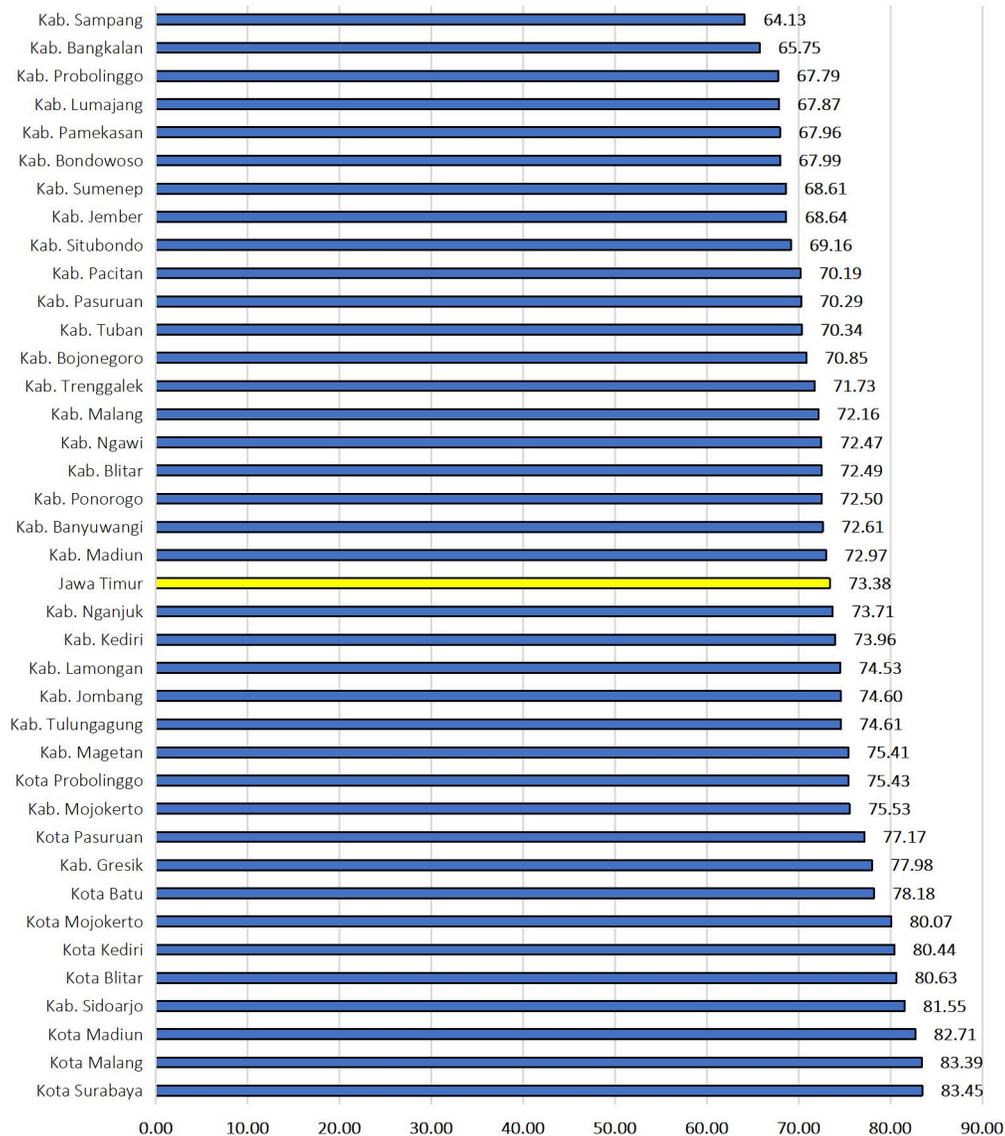
DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A., & Kazemi, M. (2017). Assessing Public Spending Efficiency in 20 OECD Countries. *Inequality and Finance in Macrodynamics*, 7-42.
- Afonso, A., Schuknecht, L., & Tanzi, V. (2010). Income distribution determinants and public spending efficiency. *The Journal of Economic Inequality*, 367-389.
- Ahmed, S., Dorin, F., Hasan, M. Z., & Ahmed, W. (2019). Measuring the Efficiency of Health Systems in Asia: A Data Envelopment Analysis. *BMJ Open*, 1-12.
- Anthony, R. N., & Young, D. W. (1999). *Management Control In Nonprofit Organization* (6th ed.). Boston, Massachusetts: Irwin/McGraw-Hill.
- Boadway, R., & Dougherty, S. (2018). *Decentralisation in a Globalised world*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Brini, R. (2016). Public spending efficiency, governance, political and economic policies: Is there a substantial causal relation? Evidence from selected MENA countries. *International Journal of Economics and Financial Management*, 24-34.
- Cheng, Z., Tao, H., Cai, M., Lin, H., & Lin, X. (2015). Technical efficiency and productivity of Chinese county hospitals: an exploratory study in Henan province, China. *BMJ Open Journal*, 1-10.
- Coelli, T. (1996). A Data Envelopment Analysis (Computer) Program. *Center for Efficiency and Productivity Analysis. Department of Econometrics. University of New England*.
- Coelli, T., Batlese, G. E., & Rao, D. P. (1998). *An introduction to efficiency and productivity analysis*. New York: Springer Science & Business Media.
- Farrel, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society*, 253-290.
- Gupta, S., Clements, B., & Tiongson, E. (1998). Public spending on human development. *Finance and Development*, 35.
- Gupta, S., & Verhoeven, M. (2001). The efficiency of government expenditure: experiences from Africa. *Journal of policy modeling*, 23(4), 433-467.
- Jayasuriya, R., & Wodon, Q. (2003). Explaining country efficiency in improving health and education indicators: The role of urbanization. *World Development Report*.
- Nicholson, w., & Snyder, C. (2012). *Microeconomic theory: Basic principles and extensions* (Vol. 11). Mason: USA: Nelson Education.
- Pertiwi, L. D. (2007, Agustus). Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 12(02), 123-139.
- Sen, A. (2005). Human Rights and Capabilities. *Journal of Human Development*, VI, 151-166.
- Solihin, A., Mursinto, D., & Sugiharti, L. (2017). Efficiency and Effectiveness of Government Expenditure on Education at Districts/Cities Level in East Java Indonesia. *Asian Social Science*, 13(8), 91-102.

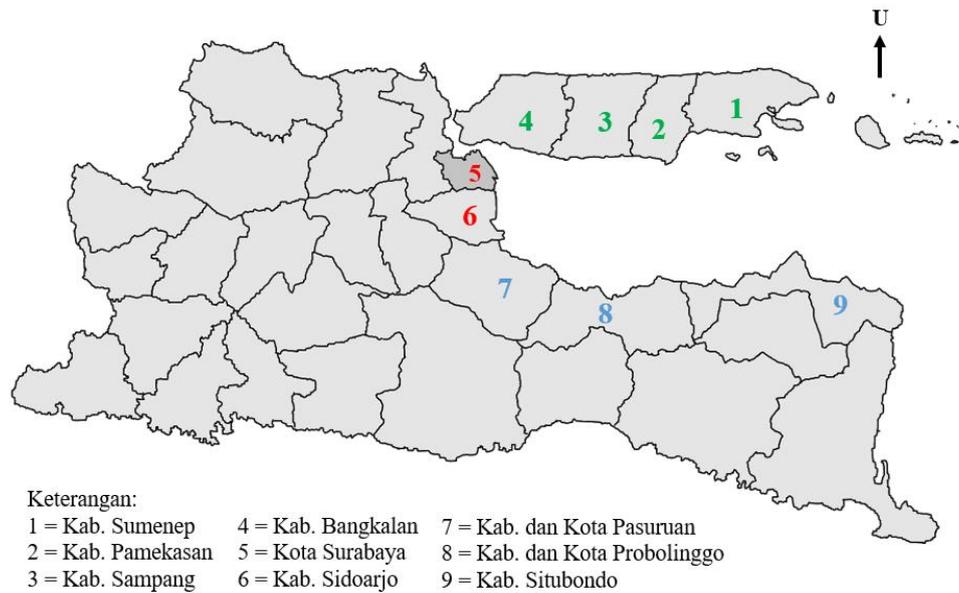
Yunan, Z. Y. (2014). Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Pulau Jawa. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, III(1), 23-44.

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

GAMBAR DAN TABEL



Gambar 1.1 IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023
 Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Jawa Timur, 2023 (diolah).



Gambar 1.2 Peta Teritorial Wilayah Tapal Kuda
Sumber: Wikipedia, 2023 (diolah)

Tabel 4.1
Hasil Pengujian Tingkat Efisiensi dengan Asumsi VRS

Kabupaten/Kota	Tahun										Rata-Rata
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kabupaten Sumenep	0,822	0,825	0,843	0,832	0,860	1,000	0,861	0,865	1,000	0,851	0,876
Kabupaten Pamekasan	0,871	0,839	0,887	0,841	0,856	0,909	0,849	0,867	1,000	0,848	0,877
Kabupaten Sampang	0,783	0,763	0,803	0,806	0,819	1,000	0,800	1,000	1,000	0,809	0,858
Kabupaten Bangkalan	0,835	0,809	0,831	1,000	1,000	0,820	0,820	0,935	0,890	1,000	0,894
Kota Surabaya	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Kabupaten Sidoarjo	1,000	0,987	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,995	1,000	1,000	0,998
Kabupaten Pasuruan	0,856	0,866	0,909	0,848	0,867	0,887	0,875	1,000	0,882	0,861	0,885
Kota Pasuruan	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Kabupaten Probolinggo	0,856	1,000	0,851	0,856	0,859	0,848	1,000	1,000	0,938	0,840	0,905
Kota Probolinggo	1,000	0,956	1,000	1,000	1,000	1,000	0,972	1,000	0,973	0,973	0,987
Kabupaten Situbondo	0,877	0,856	0,875	0,894	0,870	0,929	1,000	0,882	0,887	0,929	0,900
Rata-Rata	0,900	0,900	0,909	0,916	0,921	0,945	0,925	0,959	0,961	0,919	

Sumber: output running DEA

Tabel 4.2
Hasil Target Perbaikan Output (Indeks Pembangunan Manusia)

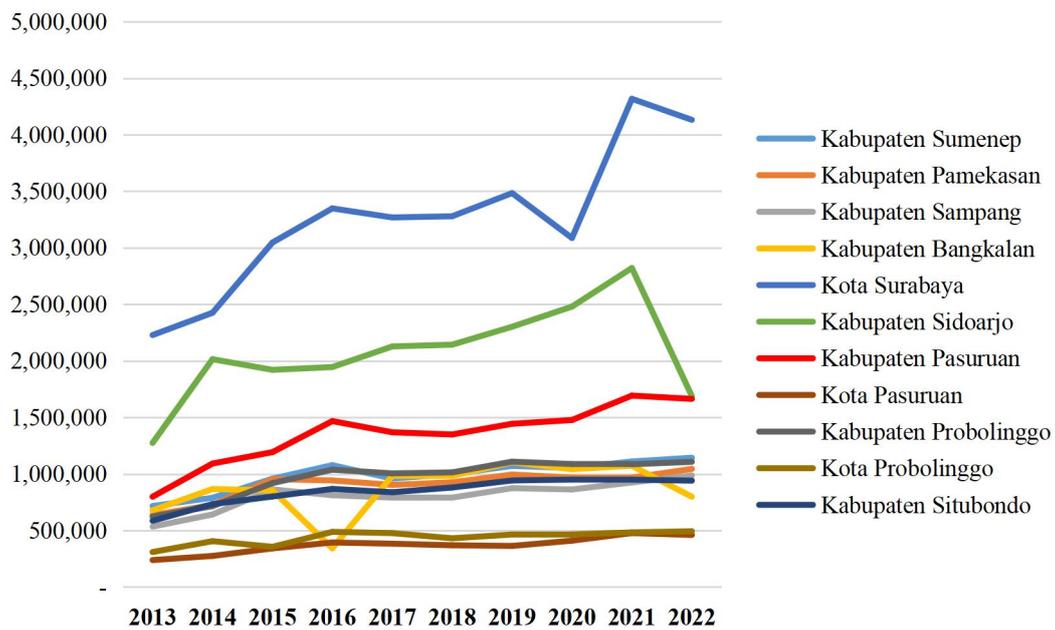
Kabupaten/Kota	Tahun	Output aktual	Output Target	Target Perbaikan
Kab. Sumenep	2013	60,84	73,02	12,18
	2014	61,43	73,98	12,55
	2015	62,38	73,56	11,18
	2016	63,42	75,75	12,33
	2017	64,28	74,40	10,12
	2018	65,25	65,00	Efisien
	2019	66,22	76,69	10,47
	2020	66,43	76,33	9,90
	2021	67,04	67,00	Efisien
	2022	67,87	78,74	10,87
Kab. Pamekasan	2013	62,27	71,21	8,94
	2014	62,66	73,90	11,24
	2015	63,10	71,00	7,90
	2016	63,98	74,87	10,89
	2017	64,93	74,73	9,80
	2018	65,41	71,54	6,13
	2019	65,94	76,53	10,59
	2020	66,26	76,13	9,87
	2021	66,40	66,00	Efisien
	2022	66,99	77,81	10,82
Kab. Sampang	2013	56,45	71,48	15,03
	2014	56,98	73,40	16,42
	2015	58,18	72,25	14,07
	2016	59,09	73,18	14,09
	2017	59,90	72,07	12,17
	2018	61,00	71,54	10,54
	2019	61,94	76,28	14,34
	2020	62,70	62,00	Efisien
	2021	62,80	62,00	Efisien
	2022	63,39	77,83	14,44
Kab. Bangkalan	2013	60,19	71,88	11,69
	2014	60,71	74,19	13,48
	2015	61,49	73,38	11,89
	2016	62,06	62,00	Efisien

Kabupaten/Kota	Tahun	Output aktual	Output Target	Target Perbaikan
	2017	62,30	62,00	Efisien
	2018	62,87	75,61	12,74
	2019	63,79	76,87	13,08
	2020	64,11	68,47	4,36
	2021	64,36	71,93	7,57
	2022	65,05	65,00	Efisien
Kota Surabaya	2013	78,51	78,00	Efisien
	2014	78,87	78,00	Efisien
	2015	79,47	79,00	Efisien
	2016	80,38	80,00	Efisien
	2017	81,07	81,00	Efisien
	2018	81,74	81,00	Efisien
	2019	82,22	82,00	Efisien
	2020	82,23	82,00	Efisien
	2021	82,31	82,00	Efisien
	2022	82,74	82,00	Efisien
Kab. Sidoarjo	2013	76,39	76,00	Efisien
	2014	76,78	77,02	0,24
	2015	77,43	77,00	Efisien
	2016	78,17	78,00	Efisien
	2017	78,70	78,00	Efisien
	2018	79,50	79,00	Efisien
	2019	80,05	80,00	Efisien
	2020	80,29	80,38	0,09
	2021	80,65	80,00	Efisien
	2022	81,02	81,00	Efisien
Kab. Pasuruan	2013	63,74	73,62	9,88
	2014	64,35	73,94	9,59
	2015	65,04	71,52	6,48
	2016	65,71	76,67	10,96
	2017	66,69	76,12	9,43
	2018	67,41	75,57	8,16
	2019	68,29	77,70	9,41
	2020	68,60	68,00	Efisien
	2021	68,93	77,10	8,17

Kabupaten/Kota	Tahun	Output aktual	Output Target	Target Perbaikan
Kota Pasuruan	2022	69,68	80,18	10,50
	2013	72,89	72,00	Efisien
	2014	73,23	73,00	Efisien
	2015	73,78	73,00	Efisien
	2016	74,11	74,00	Efisien
	2017	74,39	74,00	Efisien
	2018	74,78	74,57	Efisien
	2019	75,25	75,00	Efisien
	2020	75,26	75,00	Efisien
	2021	75,62	75,00	Efisien
Kab. Probolinggo	2022	76,54	76,00	Efisien
	2013	62,61	72,43	9,82
	2014	63,04	63,00	Efisien
	2015	63,83	73,99	10,16
	2016	64,12	74,80	10,68
	2017	64,28	74,53	10,25
	2018	64,85	75,50	10,65
	2019	65,60	65,00	-0,60
	2020	66,07	66,00	Efisien
	2021	66,26	70,33	4,07
Kota Probolinggo	2022	66,96	78,53	11,57
	2013	70,05	70,00	Efisien
	2014	70,49	73,24	2,75
	2015	71,01	71,00	Efisien
	2016	71,50	71,00	Efisien
	2017	72,09	72,00	Efisien
	2018	72,53	72,00	Efisien
	2019	73,27	75,09	Efisien
	2020	73,27	73,00	Efisien
	2021	73,66	75,00	1,34
Kab. Situbondo	2022	74,56	76,04	1,48
	2013	63,43	71,83	8,40
	2014	63,91	73,64	9,73
	2015	64,53	73,13	8,60
	2016	65,08	72,67	7,59

Kabupaten/Kota	Tahun	Output aktual	Output Target	Target Perbaikan
	2017	65,68	74,74	9,06
	2018	66,42	71,02	4,60
	2019	67,09	67,00	Efisien
	2020	67,38	75,93	8,55
	2021	67,78	75,55	7,77
	2022	68,25	73,18	4,93

Sumber: output running DEA



Gambar 4.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Daerah (Total Belanja Fungsi Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial) di Wilayah Tapal Kuda
 Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023 (diolah).